

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Madura merupakan salah satu pulau yang menyimpan sejuta potensi lokal salah satunya sektor pariwisata. Secara umum dilihat dari potensi alamnya Madura memiliki banyak bukit, air terjun, goa dan pantai. Sedangkan untuk wisata Religi lebih banyak terdapat di daerah Bangkalan. Bangkalan memiliki banyak potensi wisata religi karena kabupaten Bangkalan terkenal dengan julukan kota santri atau bumi Sholawat. Namun, untuk daerah Bangkalan kurang memiliki daya tarik pariwisata alamnya dan masih belum terlalu di kembangkan. Padahal Bangkalan merupakan gerbang utama Pulau Madura namun mengapa pariwisata yang ada di Bangkalan masih belum terlalu di kembangkan sedangkan banyak potensi yang menarik di Kabupaten Bangkalan itu sendiri.

Pemerintah ingin menjadikan Jembatan Suramadu sebagai tempat tujuan wisata baru. Dimana menjadi daya tarik sendiri bagi masyarakat yang ingin berlibur ke pulau Madura di area pesisir Jembatan Suramadu. Untuk itu dukungan infrastruktur yang sesuai dengan pengembangan Pulau Madura ke depan mengenai kebijakan pembangunan pariwisata sebagai salah bentuk infrastruktur yang memberi peluang pertumbuhan sosial maupun ekonomi khususnya di Pulau Madura. Dalam masalah ini pemerintah membentuk sebuah badan pelaksana yaitu Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS). Kebijakan pembentukan BPWS sesuai dengan Peraturan Presiden RI No 23 tahun 2009 tentang Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura. BPWS yang baru dibentuk pada tahun 2010 oleh pemerintah pusat yang bersifat sementara mempunyai visi yakni tercapainya wilayah Suramadu sebagai pusat pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan sebagai simpul transportasi nasional yang tetap dapat mempertahankan nilai budaya yang ada dalam masyarakat. Dalam mewujudkan visi ini BPWS bekerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan yang merupakan wilayah

pengembangan Jembatan Suramadu. Dengan demikian hal ini tentu dapat menstimulasi peningkatan sosial ekonomi masyarakat Bangkalan.

Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia yang menghubungkan Surabaya-Madura dengan panjang 5438 meter. Jembatan Suramadu merupakan sebagai bagian pengembangan daerah metropolitan Surabaya dimana kini pulau Madura tidak lagi terpisah, namun sudah menjadi bagian strategis pembangunan yang dikenal dengan “Gerbang Kertosusilo” yaitu (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Sidoarjo, dan Lamongan) (Basri, 2013 : 24).

Beroperasinya jembatan Suramadu membawa dampak bagi struktur tata ruang pembangunan khususnya di Jawa Timur. Oleh karena itu, konsep pengembangan kota metropolitan Gerbangkertosusilo sesuai dengan (Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008) yang menempatkan Kabupaten Bangkalan sebagai salah satu pusat kegiatannya. Semakin mudahnya akses dan transportasi ke Pulau Madura dari pada transportasi dipelabuhan Kamal dimana akan meningkatkan investasi pengusaha besar dan investor asing, karena investasi di Madura relatif sama bahkan lebih ekonomis bila dibandingkan dengan kota Surabaya.

Permasalahan yang terjadi dalam pembangunan pariwisata harus melakukan pembebasan tanah dan rumah warga di sekitar area Suramadu sisi Madura. Jembatan Suramadu mempunyai peran penting dalam kegiatan ekonomi baik skala nasional maupun pada saat ini dan dimasa mendatang. Jembatan Suramadu sisi Madura yang potensial untuk dikembangkan ialah daerah Sekar Bungoh dimana daerah ini lokasinya dekat dengan Jembatan Suramadu. Karena Suramadu disisi Madura akan dijadikan sektor pariwisata atau yang nantinya akan menjadi Madura Park seperti yang dikutip dari Kompas.com *“Jembatan Suramadu merupakan tempat tujuan wisata baru. Apalagi, pemandangan Suramadu saat matahari terbenam akan menjadi daya tarik sendiri,”* ujar Ketua Asosiasi Pengusaha Travel Indonesia (Asita) Jatim, Haryono Gondhosoewito, Selasa (30/3/2010).

**Gambar 1.1** *Sketsa Suramadu Sisi Madura*



Sumber : Surabaya.tribunnews.com

Dari gambar diatas BPWS garap objek wisata bibir pantai di rest area Jembatan Suramadu secara bertahap, tahap pertama pembangunan 180 stand PKL, dimana rest area diproyeksikan sebagai kawasan relokasi PKL Suramadu. Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) mulai melanjutkan pembangunan objek wisata bibir pantai di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu Sisi Madura (KKJSM), secara bertahap pula akan mengisi KKJSM dengan kawasan industri, perdagangan, pariwisata, Central Business District (CBD) dan permukiman. Selain wahana wisata pantai, di dalamnya akan dibangun *food court*, ruang terbuka hijau (RTH), museum, masjid, dan Islamic Centre, hingga SPBU (surabaya.tribunnews.com).

Sesuai dengan Peraturan Presiden No 27/2008 tentang Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) Wahana wisata pantai yang dilengkapi dengan taman rekreasi itu berada dikawasan 4 hektare. Disisi timur dan barat Jembatan Suramadu yang menjadi bagian dari 40 hektare kawasan rest area dan akan mengembangkan lahan 600 hektare untuk pembangunan KKJSM, 600 hektare untuk pembangunan KKJSS dan kawasan khusus pelabuhan peti kemas di sekitar Tanjung Bulu Pandan, Bangkalan, seluas 600 hektar (surabaya.tribunnews.com)“*Kami juga akan melibatkan tim appraisal tanah sebelum melakukan pembelian kepada*

*masyarakat” ungkap Kepala Divisi dan Informasi BPWS, Pandit Indrawan, Selasa (29/5/2018) yang akan mensosialisasikan kepada masyarakat setelah terjalin kerjasama dengan Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kabupaten Bangkalan.*

Harga tanah di kaki Suramadu dinilai terlalu tinggi bahkan rawan menimbulkan kerugian uang negara. Berdasarkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP), harga tanah di Suramadu berkisar antara Rp2.500 sampai Rp15.000 per meter. *“Begitu Jembatan Suramadu dibangun, harga tanah di sekitar Jembatan Suramadu naik drastis hingga Rp 1 juta per meter persegi. Kalau tak ada pengendalian harga tanah, maka pengembangan kawasan sekitar Suramadu akan sulit karena begitu berbicara harga tanah, investor langsung mundur”* kata mantan Wakil Bupati Bangkalan Syafik Rofii, Selasa (23/3/2010) dalam diskusi Madura Pasca Suramadu di kantor Kompas Gramedia, Surabaya (surabaya.kompas.com)

Pemerintah Kabupaten Bangkalan sebenarnya telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pengendalian Pengembangan Suramadu. Walaupun demikian, persoalan melambungnya harga tanah dan berbagai kendala lainnya belum terpecahkan. Ekonom Didik J Rachbini menyatakan, solusi tercepat menghindari harga tanah yang melambung adalah pemerintah membeli terlebih dulu tanah-tanah (*land banking*) yang akan dikembangkan sebagai kawasan industri. Pemerintah daerah dan DPRD setempat mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) untuk menghindari praktik spekulasi para makelar tanah (KOMPAS.com dilansir tanggal 04 Oktober 2018 pukul 06.00 WIB).

Dalam persoalan ini, kondisi Madura khususnya di Dusun Sekar Bungoh tentang pembebasan tanah dan rumah warga untuk pembangunan wisata di sekitar area Suramadu pro dan kontra warga Sekar Bungoh mengenai pembebasan tanah, dimana masyarakat Sekar Bungoh yang tidak setuju pembebasan lahan 138 KK dan yang setuju pembebasan lahan hanya 7 KK. Sedangkan Sekar Bungoh bagian barat (Krasak) sudah melakukan pembebasan lahan pada gelombang 1 pada tahun 2017 dilanjut gelombang ke dua pada tahun 2018, lahan tersebut mulai digunakan untuk pembangunan rest

area Suramadu dengan pembangunan 180 stand PKL. Alasan masyarakat kontra pada pembebasan lahan karena warga setempat mengalami kesulitan mencari lahan pengganti, masyarakat tidak mau meninggalkan kampung halaman karena tanah merupakan warisan nenek moyang, harga tanah dari masyarakat sangat mahal sehingga masih di tawar oleh pihak BPWS dan kesulitan dalam hal mencari pekerjaan baru karena mayoritas masyarakat Sekar Bungoh mata pencahariannya yaitu petani (nelayan). Kepala Desa Sukolilo Barat ingin menjadikan daerahnya sebagai tempat pariwisata walaupun harus melakukan pembebasan lahan. Proses pembebasan tanah baik untuk pariwisata maupun kawasan industri, harapan masyarakat dilakukan secara terbuka/terang-terangan dan langsung kepada rakyat tanpa adanya makelar tanah serta tidak merugikan rakyat.

Persoalan pada penelitian ini tidak jauh seperti dalam penelitian Mustain yaitu perlawanan yang dilakukan petani dipicu oleh faktor ekonomi, yaitu ketimpangan kepemilikan tanah. Namun dibalik faktor tersebut, secara politik resistensi petani muncul untuk menolak kebijakan negara mengenai masalah penguasaan pertanahan yang cenderung eksploitatif dan mengutamakan pemodal (Mustain, 2007 : 49).

Masyarakat melakukan perlawanan awalnya secara sembunyi-sembunyi berlangsung lama pada tahun 2009 sejak diresmikannya Jembatan Tol Suramadu terdapat isu pembebasan lahan program pemerintah selanjutnya. Masyarakat awalnya membentuk paguyuban tolak penggusuran dengan visi misi yang sama, tujuannya untuk melakukan penolakan pembebasan lahan yang menjadi Proyek Pemerintah yaitu Madura Park. Masyarakat mengusulkan Desa Wisata kepada pihak BPWS supaya dengan adanya Desa Wisata tidak harus menggusur penduduk sekitar area Suramadu sisi Madura. Usulan masyarakat tidak diterima oleh Pemerintah yang pada akhirnya masyarakat mulai melakukan perlawanan secara terbuka pada tahun 2017 dengan mengumpulkan warga untuk bermusyawarah masalah pembebasan lahan dan membentuk struktur baru yaitu kelompok masyarakat tolak penggusuran secara legal/resmi.



**Gambar 1.2** Banner Penolakan Masyarakat

Perlawanan yang dilakukan masyarakat dimaksudkan untuk memperkecil atau menolak sama sekali klaim-klaim yang diajukan kelas-kelas dominan atau mengajukan klaim-klaim mereka sendiri dalam menghadapi kelas dominan. Kesadaran kolektif yang dimiliki warga Sekar Bungoh di sekitar area Suramadu sehingga membentuk suatu gerakan perlawanan yang memunculkan suatu tuntutan-tuntutan kepada pemerintah (Scott : 1981). Bentuk perlawanan yang dilakukan masyarakat pemilik lahan secara perlawanan terbuka (*open rejection or struggle*) yang terorganisasi, dimana masyarakat membuat Spanduk penolakan pembebasan lahan disebar luaskan di sekitar pinggir jalan Dusun Sekar Bungoh, selain itu masyarakat memposting spanduk tersebut di media sosialnya masing-masing.

Gerakan perlawanan yang terjadi muncul pada pemerintah dan masyarakat telah mewarnai proses persiapan pembangunan pariwisata Madura Park ini. Pada tahap pelaksanaan, konflik tersebut semakin intensif karena berhadapan dengan pembebasan tanah, sehingga muncul relasi-relasi kepentingan. Akibatnya, nilai-nilai atau makna tanah bagi masyarakat Madura tergores oleh relasi kepentingan yang bersifat konvensional. Sehingga muncul konflik antara pemilik tanah dan pemerintah.

Berdasarkan deskripsi diatas, penulis merasa perlu adanya sebuah penelitian yang menyangkut problematika yang ada di Suramadu. Maka penulis mengangkat sebuah isu penelitian dengan judul ***“Pemerintah VS Rakyat (Studi Kasus Perlawanan Warga Dalam Menolak Pembebasan Lahan Pada Projek Madura Park di Dusun Sekar Bungoh Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan)”***.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi permasalahan yang terjadi yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Perlawanan Masyarakat Terhadap Pemerintah Dalam Pembebasan Lahan Pada Projek Madura Park di Dusun Sekar Bungoh Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan?

## **1.3 Tujuan**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk Mengetahui Bentuk Perlawanan Masyarakat Terhadap Pemerintah Dalam Pembebasan Lahan Projek Madura Park di Dusun Sekar Bungoh Desa Sukolilo Barat Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan

## **1.4 Manfaat**

Keluaran hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis: Secara teoritis, penelitian bermanfaat bagi pengembangan ilmu sosiologi, khususnya terkait dengan penerapan teori-teori sosiologi.
2. Manfaat praktis: Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah dalam kebijakan pembebasan lahan yang tidak merugikan masyarakat, dan memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang terkena pembebasan lahan di daerah tersebut.